

Digital Transformation Acceleration Policy in Indonesia (Study on the Implementation of all in One Indramayu Information Technology in Indramayu Regency)

Ibrahim

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra

Corresponding Author: Ibrahim Ibrahimdalil10@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Public Service,
Information Technology,
E-Government, All in One

Received : 14, April

Revised : 16, Mei

Accepted: 18, June

©2023 Ibrahim: This is an open-access
article distributed under the terms of
the [Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Technology plays an important role in keeping society's activities running as they should. The practice of using information technology for the community is directed at increasing the reliability of community service technology, the effectiveness and efficiency of receiving services by the community. This study uses descriptive qualitative, where in data collection using secondary data in the form of documentation at the research location. The data analysis technique is a descriptive analysis technique, in which the analysis is carried out to be able to explain the Application of All In One Information Technology in Improving Public Services in Indramayu Regency. The results of the research show that the application of All In One Information Technology in Indramayu Regency. There are several inhibiting factors both in socialization and application implementation including internal and external factors, internal factors.

Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia (Studi Pada Implementasi Teknologi Informasi *All in One* Indramayu di Kabupaten Indramayu)

Ibrahim

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra

Corresponding Author: Ibrahim Ibrahimdalil10@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Teknologi Informasi, E-Government, All in One

Received : 14, April

Revised : 16, Mei

Accepted: 18, June

©2023 Ibrahim: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Teknologi memainkan peranan penting dalam menjaga kegiatan masyarakat tetap berjalan mestinya. Praktik penggunaan teknologi informasi bagi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kehandalan teknologi layanan masyarakat, efektifitas dan efesiensi penerimaan layanan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, dimana dalam pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder berupa dokumentasi di lokasi penelitian. Adapun teknis analisis data adalah teknis analisis deskriptif, dimana analisis yang dilakukan untuk dapat menjelaskan Penerapan Teknologi Informasi *All In One* dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian bahwa Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan Teknologi Informasi *All In One* di Kabupaten Indramayu. Ada beberapa faktor penghambat baik dalam sosialisasi maupun penerapan aplikasi tersebut di antaranya factor internal dan eksternal, faktor internal.

PENDAHULUAN

Teknologi memainkan peranan penting dalam menjaga kegiatan masyarakat tetap berjalan mestinya. Praktik penggunaannya bagi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kehandalan teknologi layanan masyarakat, efektifitas dan efisiensi penerimaan layanan oleh masyarakat, aman serta biaya murah. Harapan untuk mewujudkan keinginan tersebut dihadapi oleh pemerintah daerah secara bervariasi sesuai dengan kebutuhan peningkatan pelayanan publik dan dinamika permasalahan keamanan nasional dan daerah Transformasi digital membuat masyarakat untuk beradaptasi menggunakan teknologi informasi berbasis internet atau online. Pemerintah daerah memiliki banyak kepentingan dalam upaya pengembangan TIK di daerah, kepentingan dimaksud diantaranya untuk mempermudah aktivitas pelayanan publik dan tata perizinan, serta secara khusus juga untuk kepentingan menjaga kondisi keamanan nasional ditingkat daerah. Bagi pemerintah daerah, pengembangan TIK diarahkan untuk terwujudnya *good governance* yang berasaskan transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu pemerintah daerah menyadari bahwa pengembangan TIK di daerah memerlukan prioritas pengembangannya.

Menangani permasalahan ini antara lain dengan menetapkan kebijakan Organisasi Dalam Tata Kerja Dinas Komunikasi Dalam Informatika, seperti yang tertuang dalam perda No. 48 tahun 2016 secara bertahap, pengembangan aplikasi, penyebaran informasi publik, bimbingan teknis SDM dan kajian kelembagaan serta melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa pemangku kepentingan. Belum optimalnya menerapkan aplikasi *All In One* terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu terutama dalam sektor sosialisasi, tercatat yang *me-registrasi login* sebanyak 1000 jiwa atau mencapai 1%, sedangkan tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Indramayu yang mencapai 1.7 juta menurut data BPS Kabupaten Indramayu.

Aplikasi Indramayu *all in one* merupakan sistem informasi yang khusus dibuatkan untuk memudahkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat guna tercapainya optimalisasi pelayanan umum yang cepat, profesional, dan transparan. Data tersebut kemudian akan di proses oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Indramayu. Pada prinsipnya, pengembangan E-Government dalam inovasi pelayanan publik di daerah lewat Penerapan teknologi informasi memberikan pelayanan dalam meningkatkan pelayanan publik juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah, dimana daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisa menjadi bisnis masyarakat sehingga ada dampak memakmurkan ekonomi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka akan meneliti lebih jauh tentang sistem informasi daerah Indramayu. Penerapan Teknologi Informasi *All In One* Indramayu di Kabupaten Indramayu. Kebaruan dalam riset ini adalah TIK diarahkan pada ketersediaan jaringan informasi dan data yang menghubungkan instansi pemerintah dalam rangka otomatisasi pelayanan umum, dimana pelayanan umum yang cepat, profesional, transparan, dan lebih mudah merupakan harapan dari seluruh masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Aplikasi Indramayu *All in One*

Aplikasi Indramayu *all in one* merupakan sistem informasi yang khusus dibuatkan untuk memudahkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat guna tercapainya optimalisasi pelayanan umum yang cepat, profesional, dan transparan. Data tersebut kemudian akan di proses oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Indramayu.

METODOLOGI

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang memusatkan pada pemecahan yang ada sekarang dengan yang sedang berlangsung dengan jalan mengumpulkan data lalu disusun yang kemudian dianalisa untuk memperoleh jawaban. Unsur analisisnya adalah keseluruhan unsur yang terkait secara langsung dalam penerapan aplikasi Indramayu *All In One* di Kabupaten Indramayu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis data dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dilengkapi dengan data sekunder dan data primer. Key Informan yang menjadi sumber data dipilih yaitu, orang-orang yang benar-benar berkompeten dalam memberikan informasi dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Aplikasi Indramayu *All in One* dalam Mendukung *E-Government* di Kabupaten Indramayu

Aplikasi *all in one* merupakan aplikasi pelayanan publik untuk diakses masyarakat umum sebagai terobosan baru pemerintahan kabupaten Indramayu di bidang teknologi digital melalui Dinas komunikasi dan Informatika dengan menghadirkan aplikasi tersebut untuk menunjang sarana dan prasarana di era digitalisasi sekarang ini. aplikasi ini bertujuan agar memudahkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta dapat di unduh melalui playstore. Menjalankan suatu sistem berbasis teknologi informasi di daerah Indramayu yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Indramayu dalam mengoperasikan Sistem dan Prosedur Aplikasi Indramayu *all in one* diantaranya sebagai berikut :

Sebagai gambaran teknis penggunaan aplikasi Indramayu *all in one* dengan beberapa langkah, yaitu :

1. Dowonload aplikasi Indramayu all in one dengan Handphone berbasis android di playstore, install aplikasi Indramayu all in one



Gambar.1 Apk Indramayu all in One

2. Buka aplikasi tersebut kemudian anda akan di minta untuk mendaftar, lalu klik “mendaftar” selanjutnya akan muncul form biodata pribadi yang harus di lengkapi untuk pengisian no NIK sendiri perlu meng-klik “cek” di samping kolom NIK, apabila form sudah dilengkapi kemudian klik “buat akun” yang terdapat di bagian bawah

Gambar.2 From Biodata Mendaftar akun Apk Indramayu

3. Setelah berhasil masuk maka akan muncul notifikasi “selamat dating” dan klik “ok”



Gambar.3 Notifikasi Berhasil Mendaftar Akun

4. Kemudian akan muncul berbagai menu, seperti pengaduan, kesehatan, ibadah, lowongan, pariwisata, Pendidikan, perizinan, kendaraan dan berita.



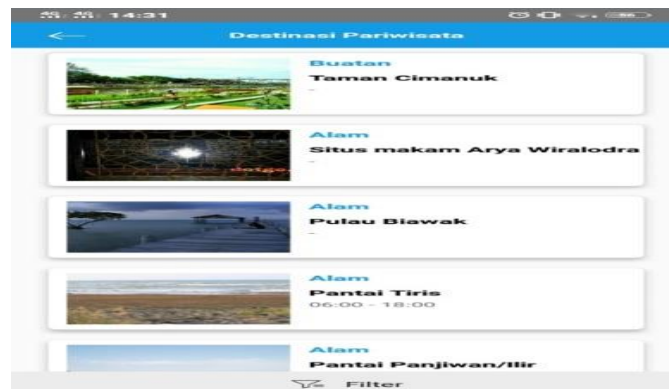
Gambar.4 Menu Utama Indramayu All in One

5. Sebagai contoh klik menu “pariwisata” untuk mengetahui isi yang terdapat di dalamnya, ketika sudah meng-klik menu “pariwisata” maka muncul pilihan yang akan di tujuh disini sebagai contoh pilih “destinasi”



Gambar.5 Menu Pariwisata

6. Apabila sudah memilih destinasi maka akan muncul informasi berbagai tempat wisata di daerah Indramayu.



Gambar.6 Destinasi Pariwisata

Kebanyakan dari pengguna ponsel aktif yaitu di lingkungan pelajar dan pegawai yang digunakan lebih dari sekedar alat komunikasi tetapi untuk mencari data dan informasi, selebihnya masyarakat pada umumnya hanya mempergunakan ponsel hanya sebagai alat komunikasi, hal itu di sebabkan dengan kurangnya pengetahuan dan kebutuhan dibidang komunikasi, sehingga Output dalam pembuatan aplikasinya memang cukup baik , hanya saja pengguna dari aplikasi ini hanya mencapai 1% dari 99% penduduk Indramayu yang menjadi kendala bagi pemerintah daerah dan diskominfo. Adapun kendala yang saat ini perlu di benahi ialah dari sekor sosialisasi, SDM, anggaran, gedung TIK, alat (teknologi) sebagai penunjang keberhasilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Indramayu. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Diskominfo sendiri belum cukup optimal dari mulai tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan. Sosialisasi yang dilakukan diskominfo melibatkan beberapa pemerintahan kabupaten hingga SKPD yang berkaitan.

2. Implementasi Teknologi Informasi All In One Indramayu di Kabupaten Indramayu.

Aplikasi All In One Indramayu menghadirkan pelayanan publik dengan konsep digitalisasi untuk mempermudah akses kebutuhan pelayanan masyarakat Indramayu, sehingga aplikasi All In One ini menghadirkan pelayanan publik di berbagai sector pelayanan seperti pengaduan, kesehatan, ibadah, lowongan pekerjaan, pariwisata, pendidikan, perizinan, kendaraan dan berita daerah Indramayu dan lainnya. Dalam pengembangan aplikasi All In One Indramayu belum seluruhnya dimanfaatkan dan dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indramayu, karena Kabupaten Indramayu dengan kondisi geografi yang kebanyakan penduduknya dengan mata pencaharian sebagai petani dan nelayan hal ini sangat menghambat perkembangan dari aplikasi Indramayu all in one sebab tidak semua orang menggunakan alat elektronik berupa ponsel serta tidak begitu mengetahui fungsi lebihnya sebagai sarana informasi lainnya.

Proses implementasi Pada Implementasi Teknologi Informasi All In One Indramayu di Kabupaten Indramayu ada beberapa diantaranya, Van Meter dan Van Horn, (1975):

- A. Ukuran dan tujuan kebijakan dalam konteks implementasi Pada Implementasi Teknologi Informasi All In One Indramayu di Kabupaten Indramayu, proses implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui standar atau ukuran dan tujuan yang rumit pada tujuan keseluruhan keputusan kebijakan. Van Meter dan Van Horn, (1975) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Dari data yang disampaikan diatas, terlihat ada beberapa faktor standar atau ukuran tujuan yang mempengaruhi jalannya komunikasi yaitu :

1. Sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.
 2. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana
 3. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan
- B. Komunikasi antar organisasi, merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan Implementasi Teknologi Informasi All In One Indramayudi Kabupaten Indramayu. Melihat sejauh mana para implementor kebijakan melakukan koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu.

Hal ini ditunjukkan dari data dan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu, terlihat ada beberapa proses komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten Indramayu dengan cara:

1. Konsolidasi kebijakan yang tepat.
2. Sosialisasi yang terjun langsung ke lokasi/ penyuluhan.
3. Pelayanan melalui telepon, sms, email dan website.
4. Komunikasi secara formal dan informal.
5. Koordinasi antar organisasi dan pejabat terkait, dan
6. Koordinasi antar sub-sub bagian.

C. Menurut Van Mater dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa Karakteristik agen pelaksana meliputi organisasi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri serta cocok dengan agen pelaksanaanya, Dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu.

Terlihat ada beberapa proses komunikasi yang dilaksanakan oleh dengan cara:

1. Pelaksana yang mempunyai kejujuran dan transparan.
2. Pelaksana yang berkomitmen dan bertanggung jawab.
3. Sifat/watak yang demokratis dan profesional
4. Pelaksana yang paham, cepat, dan mudah Sesuai aturan dan SOP yang ada.
5. Tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

3. Aspek Penghambat Penerapan Aplikasi Indramayu All In One

A. Anggaran

Pengembangan aplikasi Indramayu all in one yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi dirasa belum maksimal hal ini di dasari oleh keterbatasan anggaran yang di gelontorkan oleh pemerintah daerah (PEMDA) kepada Dinas Komunikasi dan Informasi, sebab dalam pembuatan atau untuk pengembangan aplikasi yang berbasis online membutuhkan anggaran yang tidak sedikit yang digunakan untuk membuat infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung. Untuk tipe jaringan wireless itu yang sekarang digunakan memang terbilang murah namun berdampak terhadap kualitas yang dirasa tidak begitu cepat dan terbatas dalam penggunaannya. Dinas Komunikasi dan Informasi mempunyai rencana untuk menerapkan tipe jaringan kabel (Wired) namun itu semua membutuhkan jumlah anggaran yang besar, informasi yang didapat dari kasubag Diskominfo itu kurang lebih membutuhkan anggaran sebesar 2 milyar lebih untuk tipe jaringan tersebut.

B. Gedung dan Teknologi (computer)

Kebutuhan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai adalah syarat utama bagi kemajuan dari setiap program yang akan dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) yang meliputi, yaitu kantor tempat bekerjanya dari Diskominfo untuk memaksimalkan kinerja karena untuk bagian server tersendiri itu diperlukan gedung yang tinggi supaya dapat dengan optimal mencakup lebih luas, jika melihat kantor dari diskominfo yang sekarang itu kurang memadai karena ruangan yang begitu sempit menimbulkan tidaknya maksimal dalam menjalankan kinerja yang terbatas. Maka kominfo sendiri mengharapkan untuk di anggarkan buat pembuatan gedung khusus buat kinerja dikominfo, selain kendala tempat atau gedung buat kerja juga terkendala dengan keterbatasan teknologi computer. Keterbatasan peralatan di kantor diskominfo seperti computer masih kurang untuk memenuhi kebutuhan yang lebih banyak sebab sekarang semua pekerjaan yang ada dampaknya semua program yang di canangkan oleh diskominfo di kelola oleh dinas-dinas lain selain beralasan gedung juga computer menjadi sebab utama, tetapi diskominfo menjadi server utama bagi setiap pengelolaan teknologi informasi.

C. Tenaga Kerja

Sekarang ini tenaga kerja yang tersedia di diskominfo sebanyak 41 orang untuk menjalankan tugas dan fungsi dari diskominfo sendiri, menurut pihak terkait ketika wawancara dengan Bapak Heru mengatakan dengan jumlah pegawai sekarang yang tersedia masih belum bisa menutupi dari berbagai banyaknya tuntutan bagi diskominfo karena untuk pegawai yang menangani khusus untuk server tersendiri di butuhkan kurang lebihnya 10 orang yang menangani, tak hanya itu ia menambahkan juga untuk bagian peliputan masih perlu tambahan pegawai juga. Untuk beberapa sektor yang tersedia di dalam pekerjaan diskominfo kebanyakan masih membutuhkan tenaga pegawai lagi khususnya untuk di tempatkan disektor Command Center yang ahli terhadap bidang IT serta untuk memenuhi jam kerja yang full 24 jam non-stop, sehingga perlu lebih banyak pegawai untuk bisa melakukan rotasi kinerja berbasis shift.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bersasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Aplikasi Indramayu *All In One* dalam Mendukung *E-Government* di Kabupaten Indramayu

Untuk mencapai keberhasilan dalam era teknologi pemerintahan Kabupaten Indramayu perlu meningkatkan sistem informasi pemerintahan untuk mencapai *E-Government* pemerintah lebih baik, upaya dari Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam penerapan *E-Government* telah menerapkan dan menggunakan sebanyak 50 aplikasi untuk menunjang kinerja pegawai secara efisien dan efektif namun dalam hal penerapan aplikasi tersebut ada beberapa hal yang masih dalam tahap pengembangan salah satunya aplikasi pelayanan publik yang dapat di akses masyarakat umum adalah aplikasi Indramayu *all in one* yang dalam hal ini menjadi focus pembahasan ini.

Belum optimalnya menerapkan aplikasi *All In One* terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu terutama dalam sektor sosialisasi, tercatat yang me-*regristrasi login* sebanyak 1000 jiwa atau mencapai 1%, sedangkan tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Indramayu yang mencapai 1.7 juta menurut data BPS Kabupaten Indramayu. Aplikasi Indramayu *all in one* merupakan sistem informasi yang khusus dibuatkan untuk memudahkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat guna tercapainya optimaslisasi pelayanan umum yang cepat, professional, dan transparan. Data tersebut kemudian di proses oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Indramayu.

2. Faktor kendala dalam penerapan Aplikasi Indramayu *All In One*

Langkah dalam modifikasi pembuatan aplikasinya memang cukup baik , hanya saja pengguna dari aplikasi ini hanya mencapai 1% dari 99% penduduk Indramayu yang menjadi kendala bagi pemerintah daerah dan diskominfo. Adapun kendala yang saat ini perlu di benahi ialah dari sekor sosialisasi, SDM, anggaran, gedung TIK, alat (teknologi) sebagai penunjang keberhasilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Indramayu. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Diskominfo sendiri belum cukup optimal dari mulai tingkat kabupaten hingga kecamatan. Sosialisasi yang dilakukan diskominfo melibatkan beberapa pemerintahan kabupaten hingga SKPD yang berkaitan. Kemudian ada beberapa faktor kendala lainnya, seperti anggaran dari pemerintah daerah, sebab dalam pembuatan atau untuk pengembangan aplikasi yang berbasis *online* membutuhkan anggaran yang tidak sedikit yang digunakan untuk membuat infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung.

Pengembangan aplikasi indramayu *all in one* hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menunjang sarana dan prasarana di era digitalisasi, namun aplikasi tersebut masih terus dalam tahap pengembangan dan juga ada beberapa faktor penghambat baik dalam sosialisasi maupun penerapan aplikasi tersebut di antaranya faktor internal dan eksternal, factor internal merupakan factor penghambat dari dalam yaitu kurangnya tenaga ahli IT sebagai pengendali operasional system dan belum maksimalnya pelatihan khusus bidang IT, anggaran yang terbatas, kurangnya fasilitas pendukung seperti gedung yang belum memadai dan juga belum adanya gedung dan alat khusus media IT.

Sedangkan faktor eksternal merupakan factor dari luar yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dalam media teknologi serta kurangnya sosialisai kepada masyarakat. Maka dalam hal ini kami menyarankan kepada pemerintah daerah kabupaten indramayu dan pemerintah pusat agar serius dalam pelaksanaan *E-Government* secara menyeluruh dengan mengatasi beberapa kekurangan tersebut dan factor penghambat dalam pelaksanaanya, dengan hal ini dapat teratasi akan terciptanya pemerintahan yang baik sesuai dengan intruksi presiden dan peraturan-peraturan yang ada sebagai wujud dan cita-cita berasama untuk kepentingan masyarakat dalam pelayanan publik.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih Melakukan Penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Implementasi Teknologi Informasi All in One Indramayu di Kabupaten Indramayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital. Penerbit :, Yogyakarta, 2002
- Andrianto, Nico. (2007). Good Goverment: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Goverment, Malang: Bayumedia
- Arimurti, Agung, E-Government : Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Studi Penerapan E-Government di Pemerintah DI Yogyakarta, Magister Sistem Informatika, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Amri, (2016). Analisis pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam menunjang terwujudnya makasar smart city. Volume. 05 Nomor 02 .

Diakase 15 Juni 2021

- Aprilia, S. N., Wijaya, A. F., & Suryadi, S. (2014). Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 17(2), 126-135
- Ely Sufianti, aplikasi e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada beberapa pemerintah daerah kota/kabupaten di indonesia .
Dikases 7 Juni 2021
- Forman, C., Goldfarb, A., & Greenstein, S. (2005). Geographic location and the diffusion of Internet technology. *Electronic Commerce Research and Applications*, 4(1), 1-13.
- Forman, M. (2005). Using IT to Transform the Effectiveness and Efficiency of Government. *Journal E-Government and Information Technology*, diakses 11 Juni 2021
- Huberman, Michael (1992). Analisis data kualitatif. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Howlett and Ramesh. 1995. Studying Public Policy:: Policy Cycles and Policy Subsystem. New E-Government: A Definition of E*Government. ([http//www.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm](http://www.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm)>)
[Diakses pada 8 juni 2021]
- Heeks, Richard: Building e-Governance for Development: A Framework for National and Donor Action. Working Paper No. 12. Institute for Development Policy and Management – University of Manchester,(10 Juni 2021)

Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik, Diterbitkan oleh Gava Media Anggota

IKAPI DIY.2018. Yogyakarta

Handayaningsih, S. (2008, June). Pembuatan Model Pengembangan Teknologi Informasi (Ti) Government Berdasarkan Budaya Organisasi Studi Kasus: Pemerintahan Kabupaten Sleman. In Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF) (Vol. 1, No. 5). Diakses 11 Juni 2021,

Indrajani. (2014). "Database System Case Study All In One". Elex Media Komputindo: Jakarta.

Juliarso. Ahmad. Analisis implementasi E-Government dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik pemerintahan Kabupaten Ciamis. Volume 10, Nomor 1 Januari 2019. Diakses 11 Juni 2021

Joko Tri Nugraha. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media (Volume 2, No.1) di akses pada tanggal 7 Juni 2021

James S.L. Yong (2003). E-Government in Asia: Enabling Public Service Innovation in the 21st Century. Singapura, Time Editions. Diakses 10 Juni 2021

Indrajid, Richardus Eko. (2004). Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital). Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Muhammad, Fadel. Reinventing local Government : Pengalaman dari Daerah. Penerbit PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia

Moenek, reydonnyzar. Sistem Informasi Pelayanan Publik. Diterbitkan oleh PT Remaja Rosdakarya. 2020 Bandung.

Nur, E. (2014). Penerapan e-government publik pada setiap skpd berbasis pelayanan di kota palu. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, 18(3), 123749. Diakses pada tanggal 27 Mei 2021

Moleong, lexy J.(2009). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: RemajaRosdikarya

Pahlevi, Indra. Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi. Diterbitkan Oleh : P3DI Sekjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2015

Pieterse, Willem., Citizens and Service Channels: Channel Choice and Channelmanagement Implications, International Journal of Electronic Government Research. Diakses 7 Juni 2021

Pratama, Ririrn &Kaherah.Nur. (2019) Penerapan E-Government dalam mewujudkan pelayanan kualitas publik dikabupaten Bone//
<https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik> vol 04 No 02
November 2019. Diakses pada tanggal 12 Juni 2021

Rawan, A. (2018). Sistem Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. Societas